

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Hantono, dkk (2021:100) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Adapun menurut I Gde Yoga Permana & Ida Ayu Putu Sri Widnyani (2020:19) adalah sebagai berikut:

“Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas”.

Dari pengertian beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang diterapkan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

###### **2.1.1.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Indra F. Bagjana, dkk (2021:4) Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki indikator adalah sebagai berikut:

- 1) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- 2) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

- 3) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- 4) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- 5) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasian
- 6) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
- 7) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan

Sedangkan menurut Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi

(2018:L-34) Indikator standar akuntansi pemerintahan dapat dilihat dari:

- 1) Penyajian Laporan Keuangan
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan
- 5) Akuntansi Persediaan
- 6) Akuntansi Investasi
- 7) Akuntansi Aset Tetap
- 8) Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaannya
- 9) Akuntansi Kewajiban
- 10) Koreksi Kesalahan
- 11) Laporan Keuangan Konsolidasian
- 12) Laporan Operasional

Adapun indikator Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan, Akuntansi Aset Tetap, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional.

### **2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi**

### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Romney dan Steinbart (2018:10) menyatakan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

*“Accounting information system is a system that collects, records, stores, and processes data to produce information for decision makers. It Includes people, procedures and instructions, data software, information technology infrastructure, and internal controls and security measures.”*

“Suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan”

Selanjutnya menurut Lilis Puspitawati (2021:3) menyatakan:

“Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang secara spesifik melakukan pengolahan data yang berasal dari transaksi keuangan dan transaksi yang terkait dengan keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengguna mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal.

### **2.1.2.2 Indikator Sistem Informasi Akuntansi**

Indikator kualitas sistem informasi akuntansi menurut Seddon dalam Lilis Puspitawati (2021:62) adalah sebagai berikut:

- 1) *System Quality* (Kualitas sistem)
- 2) *Information Quality* (Kualitas informasi)
- 3) *Perception of use degree* (Persepsi terhadap tingkat pengguna)

4) *User satisfaction* (kepuasan pengguna) dan

5) *System use* (Penggunaan sistem informasi)

Adapun indikator sistem informasi akuntansi, menurut Romney and Stainbart (2018:635) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dapat diukur dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Kegunaan (*Usefulness*)

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan output informasi yang akan membantu manajemen dan pengguna dalam membuat keputusan.

2) Ekonomis (*Economy*)

Manfaat sistem diharapkan harus melebihi biaya.

3) Keandalan (*Reliability*)

Sistem harus memproses data secara akurat dan lengkap.

4) Ketersediaan

Pengguna harus dapat mengakses sistem pada kenyamanan mereka.

5) Pelayanan (*Customer Service*)

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas diharapkan dapat memberi pelayanan yang efisien terhadap pengguna.

6) Kapasitas (*Capacity*)

Kapasitas sistem harus cukup untuk menangani periode operasi puncak dan pertumbuhan masa depan.

7) Kemudahan Penggunaan (*Ease Of Use*)

Sistem harus mudah digunakan.

8) Fleksibel (*Flexibility*)

Sistem harus dapat mengakomodasi perubahan persyaratan yang wajar.

9) Traktabiliitas (*Tractability*)

Sistem mudah dipahami dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan pengembangan dimasa depan.

10) *Auditability*

*Auditability* dibangun kedalam sistem dari awal.

11) Keamanan (*Security*)

Demi keamanan informasi hanya pengguna yang diberi wewenang, yang diberi akses ke atau diizinkan untuk mengubah data sistem.

Adapun indikator Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kegunaan (*Usefulness*), Ekonomis (*Economy*), Keandalan (*Reliability*), Ketersediaan, Kapasitas (*Capacity*), Kemudahan Penggunaan (*Ease Of Use*), dan Keamanan (*Security*).

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Fadillah Amin (2019:156):

“Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dapat dipahami serta dirancang tidak menyesatkan kepada penggunanya.”

Selanjutnya menurut Sukmawati Sukamulja (2019:24):

“Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mampu memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis”.

Menurut Riana Mayasari (2021:30):

“Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan syarat terwujudnya pemerintahan yang baik, karena memerlukan perubahan cara berpikir dan prinsip pengelolaan keuangan, oleh karena itu harus dilengkapi oleh aparatur yang memiliki kemampuan mengelola keuangan daerah dan dapat memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah, sehingga pengguna dapat memahami informasi keuangan yang terdapat dalam laporan”.

Berdasarkan definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari proses entitas akuntansi sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah dan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna.

### **2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Indikator kualitas laporan keuangan menurut Hery (2021:7) sebagai berikut:

- 1) Dapat Dipahami Agar bermanfaat
- 2) Relevan
- 3) Keandalan
- 4) Dapat Dibandingkan
- 5) Konsistensi

Sedangkan menurut Sukmawati Sukamulja (2019:24-25) indikator Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diataranya:

1) Dapat dipahami

Kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan.

2) Relevan

Dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3) Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4) Keandalan

Bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5) Pertimbangan Sehat

Kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

6) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan informasi dalam keuangan harus lengkap dalam batas materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi tinjauan dari segi relevansi.

7) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antara aktivitas untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative.

8) Tepat waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya pada laporan keuangan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

9) Keseimbangan antar biaya dan manfaat

Laporan keuangan dianggap berkualitas apabila manfaat atas informasi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya penyediaanya.

10) Netral

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila dalam proses penyusunan dapat dipastikan terbebas dari upaya yang memihak pada pandangan peristiwa dan pihak-pihak tertentu.

Adapun Indikator Kualitas Laporan Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan beberapa ahli pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut (Rapika Anwar, 2021:5) menyatakan bahwa:

“Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, Andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik”.

Selanjutnya menurut (Dito Aditia Darma Nasution, Mika Debora Br. Barus, 2019:2) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintah yang baik. Laporan keuangan tersebut agar dapat memenuhi tujuan yang menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan

keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitasnya penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Pengaruh penerapannya dalam hal ini adalah apabila kegiatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam SAP secara benar dan lengkap maka otomatis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lailatur Rohmah,dkk (2020:49) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Astika Rahmawati, dkk (2018:16) menyatakan bahwa Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Abdul Rohman, dkk (2020:163) juga menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan standar

akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **2.2.2 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan beberapa ahli pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut (Dito Aditia Darma Nasution, Mika Debora Br. Barus, 2019:9-10) menyatakan bahwa:

“Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sistem yang dapat diandalkan yaitu sistem yang mampu mengolah data dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus memahami sistem akuntansi agar dapat mengelola keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP”.

Selanjutnya menurut (Anna Marina, dkk, 2018:33) menyatakan bahwa:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi relevan (*relevance*), keandalan (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*) dapat dihasilkan dari SIA yang berkualitas”.

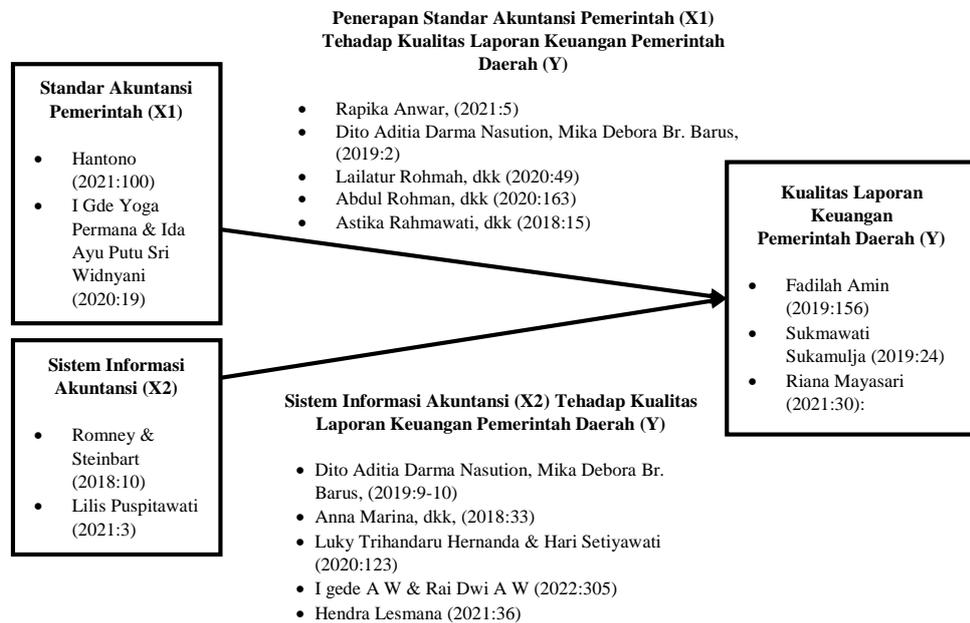
Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, hal ini dapat dilihat dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 pasal 6 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi

pemerintah yang menyatakan penyusunan laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan.

Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu Penelitian Luky Trihandaru Hernanda & Hari Setiyawati (2020:123) yang menyatakan bahwa, Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan penelitian sebelumnya yang dilakukan I Gede A W & Rai Dwi A W (2022:305) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Karangasem. Begitupun dengan hasil penelitian Hendra Lesmana (2021:36) yang menyatakan Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian penelitian sebelumnya membuktikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Semakin baik sistem informasi dalam suatu instansi maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

### 2.2.3 Paradigma Penelitian



**Gambar 2. 1**  
**Paradigma Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Syofian Siregar (2018:112) hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya”.

Berdasarkan pengertian sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah